

Studi Yuridis Perlindungan Hukum Pada Lembaga Layanan Urutan Dana (*Securities Crowd Funding*) Berbasis Digital (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)

Recca Ayu Hapsari¹, Adheliana Shafira Riska²

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: recca@ubl.ac.id¹, adheliana18211169@student.ubl.ac.id²

Abstrak

Diadaptasi dengan kemajuan teknologi dan disandingkan dengan sektor keuangan, konsep financial technology diharapkan dapat memperkenalkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern. Produk yang dapat diklasifikasikan ke dalam bidang fintech seperti pemrosesan pembayaran (penyelesaian), investasi, perencanaan keuangan, riset keuangan, transfer, perdagangan saham, keuangan (pinjaman), dll. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan empiris. Ada dua jenis data yang digunakan: data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library study) dan studi lapangan (field studies). Analisis data yang digunakan bersifat hukum kualitatif. Berkaitan dengan perlindungan konsumen, terhadap pelanggaran tindak pidana yang dilakukan dalam pelaksanaan SCF dapat dikenakan Sanksi Pidana. Dalam hal ini, Sanksi Pidana tersebut tidak diatur dalam POJK SCF. Namun, Sanksi Pidana diatur di dalam UU Pasar Modal mengenai Tindak Pidana Pasar Modal. Sanksi atas pelanggaran Tindak Pidana Pasar Modal diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 110 UU Pasar Modal serta diatur pula dalam POJK No. 3/POJK.04/2021. Sanksi tindak pidana dalam kegiatan pasar modal antara lain adalah Denda, Kurungan hingga Penjara.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Lembaga Layanan Urutan Dana, Digital

Abstract

The concept of financial technology, adapted to technological advances and combined with the financial sector, is expected to introduce a more practical, secure and modern financial transaction process. Products that can be categorized into the field fintech include payment processing (payments), investment, financial planning, financial research, transfers, buying and selling shares, and financing (lending) etc. This study uses a normative and empirical legal approach. There are two types of data used: secondary data and primary data. Data collection through library and field surveys. The data analysis used is juridical qualitative. With regard to consumer protection, violations of criminal acts committed in the implementation of SCF may be subject to criminal sanctions. In this case, the Criminal Sanction is not regulated in the POJK SCF. However, criminal sanctions are regulated in the Capital Market Law concerning Capital Market Crimes. Sanctions for violations of Capital Market Crimes are regulated in Articles 103 to 110 of the Capital Market Law and are also regulated in POJK No. 3/POJK.04/2021. Sanctions for criminal acts in capital market activities include fines, confinement to imprisonment.

Keywords: *Legal Protection, Crowd funding Service Agencies, Digital*

PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan di dunia teknologi informasi saat ini memiliki sebuah kontribusi yang sangat dalam untuk menyediakan macam-macam peluang transaksi pada bagian finansial di masyarakat dan meningkatkan pelayanan akses keuangan yang lebih mudah, selain itu diikuti juga kemajuan pada sektor keuangan akan adanya lembaga-lembaga teknologi pada sektor jasa keuangan (fintech), adanya financial technology memiliki tujuan dalam mempermudah dan memperluas sebuah akses yang akan diberikan kepada masyarakat terkait bentuk-bentuk dari produk keuangan dengan diikuti suatu pemahaman tentang keuangan.

Selain kemajuan pada teknologi informasi dan diikuti juga dengan perkembangan ekonomi berbasis digital memberikan dampak dengan lahirnya suatu inovasi baru yang terkait dengan sektor keuangan,